

Penerapan Perspektif *Second Generation of CPTED* dalam Upaya Merekomendasikan Daerah Asimilasi Percontohan di Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru

Imam Suyudi¹, Runi Sikah Seisabila²

^{1,2} Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Budi Luhur University

Corresponding Author's e-mail : imamsuyudi@budiluhur.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3161 - 3174

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3955>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3955>

Article History:

Received: 09-08-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : This article analyzes the formation of an assimilation pilot area using Second Generation Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) in Kebayoran Lama and Kebayoran Baru. The study used an explanatory sequential mixed-methods design. Quantitative data came from 143 community respondents, while qualitative data came from six correctional clients and one probation officer. The survey tested social cohesion, community culture, connectivity, threshold capacity, and perceptions of assimilation. All four CPTED dimensions correlated with assimilation perceptions ($r = 0.398-0.668$; $p < 0.001$). Multiple regression was significant ($F = 55.066$; $p < 0.001$; adjusted $R^2 = 0.604$), with connectivity producing the largest coefficient ($B = 0.480$). Differences between districts appeared in community culture, connectivity, and assimilation perceptions. ATLAS.ti coding found 40% negative, 35% positive, and 25% neutral sentiment, with stigma and inconsistent access to public facilities recurring in interviews. These results support a pilot model that combines community preparation, accessible public space, supervised participation, and periodic evaluation rather than relying on physical surveillance alone.

Keywords : Second Generation CPTED; assimilation; correctional clients; pilot area; social reintegration

Abstrak : Artikel ini menganalisis pembentukan daerah asimilasi percontohan dengan perspektif Second Generation Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) di Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Penelitian memakai mixed methods dengan explanatory sequential design. Data kuantitatif berasal dari 143 responden masyarakat, sedangkan data kualitatif berasal dari enam Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan satu Pembimbing Kemasyarakatan. Survei menguji kohesi sosial, budaya komunitas, konektivitas, kapasitas ambang, dan persepsi terhadap asimilasi. Keempat dimensi CPTED berhubungan dengan persepsi asimilasi ($r = 0,398-0,668$; $p < 0,001$). Regresi berganda signifikan ($F = 55,066$; $p < 0,001$; adjusted $R^2 = 0,604$), dengan koefisien terbesar pada konektivitas ($B = 0,480$). Perbedaan antarkecamatan muncul pada budaya komunitas, konektivitas, dan persepsi asimilasi. Pengkodean ATLAS.ti menghasilkan 40% sentimen negatif, 35% positif, dan 25% netral; stigma serta akses ruang publik yang tidak konsisten berulang dalam wawancara. Hasil tersebut menjadi dasar rancangan daerah percontohan yang menggabungkan kesiapan komunitas, ruang publik yang dapat diakses, partisipasi WBP dalam pengawasan Bapas, dan evaluasi berkala.

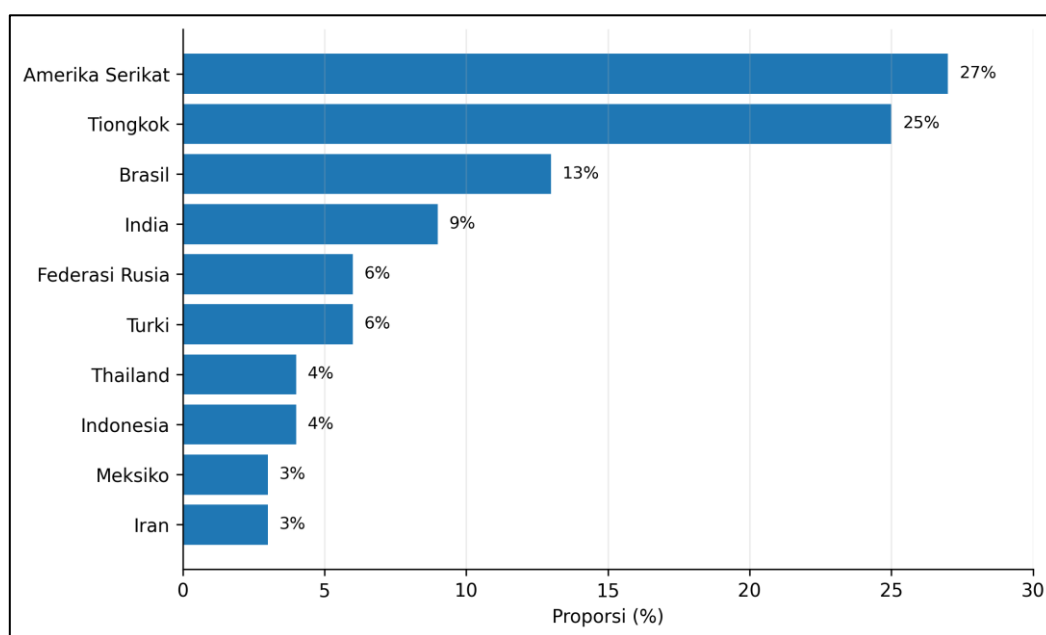
Kata Kunci : Second Generation CPTED; Asimilasi; WBP; daerah percontohan; reintegrasi sosial

PENDAHULUAN

Asimilasi menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kembali berhadapan dengan lingkungan sosial yang sebelumnya terputus selama menjalani pidana. Pada tahap ini, pembimbingan tidak berhenti pada kepatuhan administratif. WBP harus mencari pekerjaan, membangun ulang hubungan keluarga dan tetangga, memenuhi kewajiban pelaporan, serta menyesuaikan diri dengan aturan informal di lingkungan tempat tinggal. Masyarakat pada saat

yang sama menilai apakah kehadiran WBP dapat diterima. Balitbangham (2014) mencatat bahwa kekuatan budaya di luar lembaga pemasyarakatan ikut menentukan proses adaptasi tersebut.

Tekanan terhadap lembaga pemasyarakatan memberi konteks lain bagi kebutuhan reintegrasi berbasis masyarakat. Indonesia berada di kelompok negara dengan populasi penjara yang besar. Data Institute for Crime & Justice Policy Research (2024) yang digunakan dalam penelitian ini menempatkan Indonesia pada urutan kedelapan berdasarkan total populasi penjara. Badan Narkotika Nasional (2022) juga mencatat kepadatan pada sejumlah lapas narkotika. Data tersebut tidak menjelaskan keberhasilan asimilasi secara langsung, tetapi menunjukkan mengapa pembinaan di luar lapas perlu dibahas bersama dengan kesiapan masyarakat penerima.



Gambar 1. Proporsi Populasi Narapidana pada 10 Negara dengan Populasi Penjara Terbesar. Sumber: Institute for Crime & Justice Policy Research (2024), diolah dalam penelitian (2026).

Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjalankan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan. Kerangka hukum yang dipakai dalam penelitian mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta aturan teknis asimilasi yang menjadi rujukan pada masa pengumpulan data. Dalam praktik Bapas Jakarta Selatan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan asesmen, menerima laporan berkala, melakukan kunjungan rumah, dan bekerja sama dengan pihak lain untuk pelatihan atau layanan tertentu. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan juga menunjukkan bahwa indikator kondisi lingkungan belum berdiri sebagai komponen khusus dalam asesmen pembebasan bersyarat. Titik inilah yang membuka ruang bagi analisis berbasis lingkungan tanpa menggantikan syarat hukum yang sudah berlaku.

Hambatan sosial tetap terlihat ketika WBP sudah berada di luar lapas. Ditjenpas (2021) menggambarkan beban psikologis yang muncul ketika narapidana kembali ke masyarakat. Hapsari (2021) menempatkan dukungan keluarga sebagai salah satu unsur penyesuaian psikologis WBP asimilasi. Studi Sufi dan Rahayu (2022) memperlihatkan bahwa pelaksanaan asimilasi juga dipengaruhi kondisi kelembagaan dan lingkungan setempat. Literatur tersebut menjelaskan penerimaan dan dukungan, tetapi belum banyak menghubungkannya dengan karakter ruang, akses fasilitas, dan kapasitas komunitas pada satu wilayah kota.

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) memberi jalan untuk membaca hubungan antara tempat dan perilaku. Generasi pertama CPTED banyak bekerja melalui territoriality, natural surveillance, image and milieu, serta access control. Saville dan Cleveland (1997), kemudian Cleveland dan Saville (2003), memperluas kerangka tersebut dengan memasukkan kehidupan komunitas. Second Generation of CPTED menempatkan social cohesion,

community culture, connectivity, dan threshold capacity sebagai bagian dari pencegahan kejahatan. Cozens et al. (2005) mengingatkan bahwa desain lingkungan bekerja melalui penggunaan ruang dan perilaku pengguna, bukan melalui bentuk fisik semata. International CPTED Association (2022) juga menempatkan dimensi sosial sebagai bagian dari perkembangan CPTED.

Penelitian ini menggunakan empat dimensi itu untuk membaca asimilasi pada dua kecamatan yang berada dalam wilayah pengawasan Bapas Kelas I Jakarta Selatan. Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru memiliki pola ruang, kepadatan aktivitas, fasilitas, dan kebiasaan komunitas yang berbeda. Perbedaan tersebut memberi kesempatan untuk menguji dua hal sekaligus: hubungan statistik antara elemen CPTED dan persepsi program asimilasi, serta pengalaman WBP ketika berhadapan dengan lingkungan yang tidak seragam.

Istilah daerah asimilasi percontohan dalam artikel ini merujuk pada unit wilayah yang dipilih untuk menguji penggabungan empat prinsip CPTED Gen 2 dalam pembimbingan Bapas dan kegiatan masyarakat. Model yang dibahas merupakan rancangan berbasis hasil penelitian, bukan evaluasi atas sebuah pilot yang sudah berjalan. Tujuan artikel adalah menyusun dasar empiris bagi rancangan tersebut, menentukan faktor yang perlu diprioritaskan, dan menjelaskan mengapa intervensi di Kebayoran Lama tidak dapat disamakan begitu saja dengan Kebayoran Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan mixed methods dengan explanatory sequential design sebagaimana dijelaskan Creswell (2014). Tahap kuantitatif dikerjakan lebih dahulu untuk melihat pola hubungan antarvariabel. Tahap kualitatif kemudian dipakai untuk menelusuri alasan di balik angka, terutama pengalaman penerimaan, stigma, mobilitas, penggunaan ruang publik, dan hubungan WBP dengan komunitas. Johnson dan Onwuegbuzie (2004) menempatkan penggabungan dua pendekatan ini sebagai cara membaca persoalan yang tidak cukup dijelaskan oleh satu jenis data.

Survei masyarakat dilaksanakan di Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru pada kegiatan komunitas selama Agustus 2024 dengan dukungan jejaring Karang Taruna. Dataset akhir berisi 143 responden: 100 orang berdomisili di Kebayoran Lama dan 43 orang di Kebayoran Baru. Penelitian menggunakan simple random sampling sebagaimana rancangan tesis. Komposisi sampel perlu diperhatikan saat menafsirkan hasil karena 116 responden (81,1%) berusia di bawah 20 tahun dan 118 responden (82,5%) berstatus siswa atau mahasiswa. Sampel tersebut kuat untuk membaca persepsi kelompok muda yang aktif di ruang komunitas, tetapi tidak mewakili seluruh struktur umur penduduk dua kecamatan.

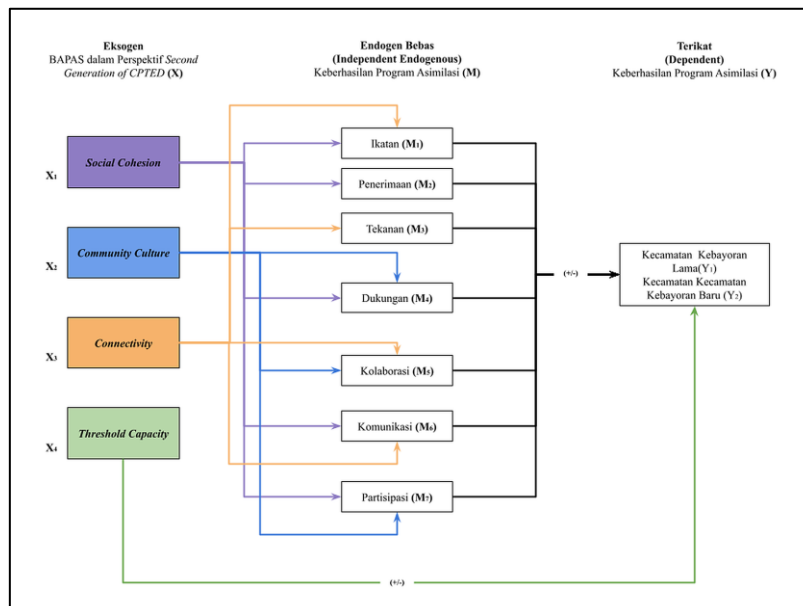
Tabel 1. Sumber Data Penelitian

No.	Sumber Data	Metode	Jumlah/Distribusi
1	Masyarakat Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru	Kuesioner terstruktur	143 responden (Kebayoran Lama; Kebayoran Baru)
2	Warga Binaan Pemasarakatan	Wawancara mendalam	6 narasumber (3 per kecamatan)
3	Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Jakarta Selatan	Wawancara mendalam	1 narasumber
4	Aset lingkungan dan fasilitas publik	Observasi, sumber pemerintah daerah, pemetaan	Dua wilayah studi

Sumber: Olahan peneliti berdasarkan dataset peneliti. 2026.

Instrumen kuantitatif mengukur social cohesion, community culture, connectivity, threshold capacity, dan persepsi terhadap program asimilasi. Semua item dinyatakan valid dalam pengujian instrumen pada tesis. Nilai Cronbach's Alpha berada pada rentang 0,963 sampai 0,984 untuk empat variabel CPTED dan 0,976 untuk persepsi program asimilasi. Analisis kuantitatif memakai SPSS 21. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat pusat dan sebaran data. Uji Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk normalitas residual. Hubungan antarvariabel dihitung dengan korelasi Pearson, perbedaan dua kecamatan diuji melalui independent samples t-test, sedangkan pengaruh simultan diuji dengan regresi linear berganda.

Tahap kualitatif melibatkan enam WBP, masing-masing tiga orang dari Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru, serta satu Pembimbing Kemasyarakatan Bapas. WBP dipilih berdasarkan pengalaman mengikuti program asimilasi dan variasi tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial. Wawancara berlangsung pada September sampai Oktober 2024. Peneliti memberi kode inisial AM, DM, MD, MS, DD, dan AA untuk WBP, sedangkan narasumber Bapas ditulis sebagai Farhan. Data wawancara dikodekan dengan ATLAS.ti untuk mengelompokkan sentimen dan tema pengalaman.



Gambar 2. Rancangan Model Visual Variabel Keberhasilan Asimilasi

Sumber: Olahan peneliti. 2026.

Pemetaan aset dilakukan pada Februari sampai Agustus 2024 melalui observasi, sumber daring pemerintah daerah, dan pencocokan informasi lapangan. Peta dipakai untuk melihat lokasi

fasilitas yang berkaitan dengan kohesi sosial, budaya komunitas, konektivitas, dan kapasitas ambang. Analisis spasial dalam penelitian ini tidak menghitung risiko kejahatan pada level individu. Peta berfungsi sebagai lapisan konteks untuk membaca apakah WBP mempunyai ruang interaksi, jalur mobilitas, fasilitas sosial, dan dukungan keamanan yang memungkinkan partisipasi komunitas.

Integrasi data dilakukan setelah hasil kuantitatif dan kualitatif tersedia. Angka regresi dipakai untuk melihat kekuatan pengaruh statistik, sementara wawancara dan pemetaan dipakai untuk menentukan konteks intervensi. Perbedaan fungsi kedua jenis data dipertahankan dalam pembahasan. Dengan cara itu, urutan prioritas kebijakan tidak disamakan secara otomatis dengan urutan koefisien regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data dan Kualitas Instrumen

Dataset kuantitatif menunjukkan rata-rata persepsi program asimilasi sebesar 29,55 (SD = 5,870) pada rentang skor 7 sampai 35. Rata-rata social cohesion sebesar 23,90, community culture 23,47, connectivity 20,51, dan threshold capacity 23,48. Residual model berdistribusi normal berdasarkan nilai signifikansi 0,333. Data ini memberi dasar untuk membaca hubungan antarvariabel, tetapi angka rata-rata tidak menjelaskan bagaimana stigma atau fasilitas bekerja di tingkat lingkungan. Wawancara dipakai untuk menjawab bagian tersebut.

Tabel 2. Karakteristik Utama Responden Kuantitatif

Karakteristik	Kategori	n	%
Jenis kelamin	Laki-laki	77	53,8
Jenis kelamin	Perempuan	66	46,2
Wilayah	Kebayoran Lama	100	69,9
Wilayah	Kebayoran Baru	43	30,1
Usia	< 20 tahun	116	81,1
Pendidikan	Tamat SMP	101	70,6
Pekerjaan	Siswa/mahasiswa	118	82,5

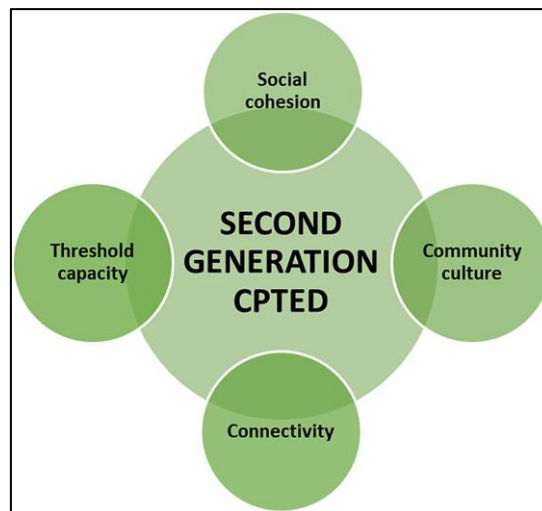
Sumber: Data primer peneliti. 2026.

Tabel 3. Statistik Deskriptif dan Reliabilitas Instrumen

Variabel	M inimum	M aksimum	M ean	SD	Cronbac h Alpha
Social Cohesion	6	30	23,90	5,578	0,970
Community Culture	6	30	23,47	5,216	0,971
Connectivity	5	25	20,51	4,636	0,984
Threshold Capacity	10	30	23,48	5,057	0,963
Persepsi Program Asimilasi	7	35	29,55	5,870	0,976

Sumber: Output SPSS Peneliti. 2026. Hubungan Empat Dimensi CPTED Gen 2 dengan Persepsi Asimilasi

Korelasi Pearson memperlihatkan hubungan positif pada seluruh dimensi CPTED Gen 2. Community culture memiliki korelasi tertinggi dengan persepsi program asimilasi ($r = 0,668$), diikuti connectivity ($r = 0,660$), social cohesion ($r = 0,582$), dan threshold capacity ($r = 0,398$). Semua hubungan memiliki $p < 0,001$. Pola ini berbeda dari naskah awal artikel yang masih memakai angka olahan terdahulu. Artikel ini menggunakan output final yang tercantum pada tesis.



Gambar 3. Kerangka Second Generation of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Sumber: International CPTED Association (2022).

Regresi berganda memberi gambaran yang lebih tajam. Model menghasilkan $F = 55,066$ dengan $p < 0,001$ dan adjusted $R^2 = 0,604$. Empat variabel CPTED bersama-sama menjelaskan 60,4% variasi persepsi program asimilasi. Connectivity menghasilkan koefisien terbesar ($B = 0,480$; $t = 5,528$; $p < 0,001$). Community culture memiliki $B = 0,239$ ($t = 2,683$; $p = 0,008$), social cohesion $B = 0,237$ ($t = 3,962$; $p < 0,001$), dan threshold capacity $B = 0,214$ ($t = 3,285$; $p = 0,001$). Nilai pada tabel output SPSS dipakai sebagai rujukan utama karena bagian persamaan pada naskah tesis memuat perbedaan angka pada koefisien social cohesion.

Tabel 4. Korelasi dan Regresi Dimensi CPTED Gen 2

Variabel	Pe arson r	p korelasi	B regresi	t	p regresi
Social Cohesion	0,582	<0,001	0,237	3,962	<0,001
Community Culture	0,668	<0,001	0,239	2,683	0,008
Connectivity	0,660	<0,001	0,480	5,528	<0,001
Threshold Capacity	0,398	<0,001	0,214	3,285	0,001

Sumber: Output SPSS Peneliti. 2026.

Uji beda antarkecamatan tidak menghasilkan pola seragam pada seluruh dimensi. Dengan baris equal variances not assumed yang dipakai pada pembacaan tesis, community culture berbeda antara Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru ($p = 0,048$), connectivity juga berbeda ($p = 0,023$), dan persepsi terhadap program asimilasi berbeda ($p = 0,013$). Social cohesion ($p = 0,676$) dan threshold capacity ($p = 0,367$) tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Hasil ini lebih berguna daripada label bahwa satu kecamatan lebih baik dari kecamatan lain karena variasi lokal muncul pada dimensi yang berbeda.

Tabel 5. Uji Beda Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru

Variabel	Sig. (2- tailed)*	Interpretasi
Social Cohesion	0,676	Tidak berbeda
Community Culture	0,048	Berbeda
Connectivity	0,023	Berbeda
Threshold Capacity	0,367	Tidak berbeda

Variabel	Sig. (2-tailed)*	Interpretasi
Persepsi Program Asimilasi	0,013	Berbeda

Sumber: Output SPSS Peneliti. 2026.

Temuan Kualitatif: Penerimaan, Stigma, dan Pengalaman Ruang

ATLAS.ti menghasilkan proporsi sentimen 40% negatif, 35% positif, dan 25% netral. Sentimen negatif berkaitan dengan stigma, komentar warga, ketidaknyamanan, dan pengalaman tidak dilibatkan. Sentimen positif muncul ketika WBP menerima dukungan RT/RW, mengikuti kegiatan masjid, mendapat pelatihan, atau menggunakan fasilitas yang membantu aktivitas harian. Sentimen netral banyak muncul pada pengalaman yang tidak konsisten, misalnya hubungan dengan tetangga cukup baik tetapi fasilitas atau dukungan keamanan terbatas.

Pengkodean emosi dan pengalaman juga memperlihatkan tujuh kelompok tema: ikatan 17,24%, penerimaan 9,79%, tekanan 13,79%, dukungan 14,81%, kolaborasi 15,79%, komunikasi 13,79%, dan partisipasi 14,79%. Persentase ini tidak dibaca sebagai ukuran psikologis individual. Angka tersebut menunjukkan distribusi kode yang muncul dalam wawancara dan membantu melihat bagian mana dari pengalaman reintegrasi yang paling sering dibicarakan narasumber.

Tabel 6. Hasil Pengkodean Kualitatif dengan ATLAS.ti

Kelompok	Kategori	Proporsi
Sentimen	Negatif	40%
Sentimen	Positif	35%
Sentimen	Netral	25%
Tema pengalaman	Ikatan	17,24%
Tema pengalaman	Penerimaan	9,79%
Tema pengalaman	Tekanan	13,79%
Tema pengalaman	Dukungan	14,81%
Tema pengalaman	Kolaborasi	15,79%
Tema pengalaman	Komunikasi	13,79%
Tema pengalaman	Partisipasi	14,79%

Sumber: Data wawancara diolah melalui ATLAS.ti, 2026.

Pengalaman AM di Kebayoran Lama memberi contoh bentuk konektivitas sosial yang bekerja melalui kegiatan biasa. Ia bergabung dalam komunitas sepak bola setelah bebas dan menyebut tidak ada penolakan ketika ikut sebagai anggota biasa. DM di Kebayoran Baru bercerita tentang keterlibatan dalam acara Maulid Nabi, kegiatan masjid, persiapan panggung 17 Agustus, dan pekerjaan dekorasi. Dua pengalaman ini memperlihatkan bahwa penerimaan tidak selalu lahir dari program formal. Interaksi berulang dalam kegiatan lingkungan memberi kesempatan bagi WBP untuk hadir sebagai warga, bukan semata sebagai mantan narapidana.

Cerita lain memperlihatkan sisi yang berbeda. AA mengkhawatirkan pemberitaan negatif yang membuat masyarakat sulit memberi kesempatan kedua. DD mendengar komentar tetangga setelah kembali dari lapas. DM mengeluhkan penerangan yang kurang, jumlah petugas keamanan yang terbatas, serta tidak tersedianya ruang publik atau fasilitas olahraga yang mudah diakses di sekitar tempat tinggalnya. Hambatan sosial dan fisik muncul bersamaan. Karena itu, desain daerah percontohan perlu bekerja pada dua lapis masalah tersebut.

Pembacaan Empiris Empat Dimensi CPTED Gen 2

Social Cohesion sebagai Dasar Penerimaan

Dalam penelitian ini, social cohesion mencakup hubungan antarwarga sekaligus kesempatan WBP untuk ikut kegiatan, menerima dukungan, berbicara dengan tetangga, dan memulihkan rasa percaya diri. Regresi menunjukkan pengaruh positif ($B = 0,237$; $p < 0,001$). Wawancara memberi bentuk konkret pada angka itu. Kegiatan olahraga, kerja bakti, acara keagamaan, dan dukungan RT/RW menjadi titik temu yang berulang dalam cerita WBP.

Masalahnya muncul ketika kontak sosial berhenti pada penerimaan pasif. WBP dapat tinggal di lingkungan yang sama tanpa benar-benar dilibatkan. Sentimen negatif sebesar 40% menunjukkan bahwa keberadaan fisik di masyarakat belum identik dengan reintegrasi. Daerah percontohan karena itu perlu memasukkan kegiatan bersama sebagai bagian dari pembimbingan, dengan frekuensi dan aktor yang jelas. Bapas tidak harus menjadi penyelenggara semua kegiatan. Peran yang lebih masuk akal adalah menghubungkan WBP dengan RT/RW, komunitas keagamaan, Karang Taruna, kelompok olahraga, dan mitra pembinaan yang sudah bekerja di wilayah tersebut.

Community Culture dan Batas Penerimaan Lokal

Community culture berhubungan kuat dengan persepsi asimilasi ($r = 0,668$) dan berpengaruh positif dalam regresi ($B = 0,239$; $p = 0,008$). Uji beda juga menemukan perbedaan antarkecamatan pada variabel ini ($p = 0,048$). Wawancara menunjukkan bahwa budaya komunitas tidak dapat disimpulkan hanya dari nama kecamatan. Beberapa lingkungan di Kebayoran Lama memberi ruang yang cukup terbuka bagi WBP melalui kegiatan RT, olahraga, dan keagamaan. Pada bagian Kebayoran Baru, peneliti juga menemukan komunitas yang aktif, tetapi narasumber lain menggambarkan sikap yang lebih berhati-hati dan adanya stigma.

Temuan agregat dan cerita lokal tersebut tidak saling meniadakan. Skor kecamatan merangkul banyak lingkungan, sementara wawancara menangkap pengalaman pada titik tertentu. Model percontohan sebaiknya memilih unit yang lebih kecil daripada kecamatan sebagai lokasi implementasi, misalnya kelurahan atau lingkungan RW yang memiliki mitra aktif, ruang kegiatan, dan mekanisme komunikasi warga. Dengan skala itu, budaya komunitas dapat dinilai dari praktik sehari-hari, bukan dari asumsi bahwa seluruh kecamatan memiliki satu karakter yang sama.

Connectivity sebagai Pengaruh Statistik Terbesar

Connectivity menghasilkan koefisien regresi terbesar ($B = 0,480$; $p < 0,001$) dan korelasi yang kuat ($r = 0,660$). Perbedaan antarkecamatan juga signifikan ($p = 0,023$). Variabel ini menggabungkan hubungan sosial dengan akses terhadap ruang, transportasi, dan jalur komunikasi. Bagi WBP, konektivitas menyentuh hal yang sangat praktis: datang ke Bapas untuk melapor, mencari pekerjaan, mengikuti kegiatan warga, menjangkau pelatihan, dan mempertahankan kontak dengan keluarga atau pendamping.

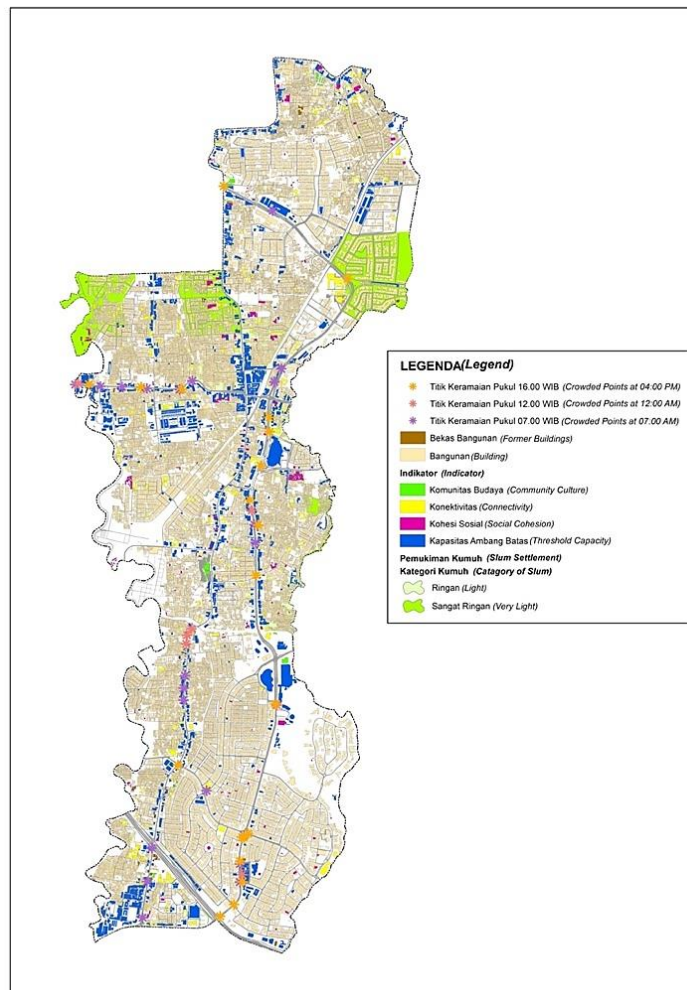
Kekuatan koefisien connectivity menjelaskan mengapa perbaikan program tidak cukup berhenti pada sosialisasi anti-stigma. WBP yang diterima masyarakat tetap kesulitan berpartisipasi bila ruang berkumpul, trotoar, transportasi, atau fasilitas kegiatan tidak tersedia. Di sisi lain, fasilitas yang lengkap tidak menjamin penerimaan jika tidak ada kegiatan yang mempertemukan warga dan WBP. Rancangan percontohan perlu menggabungkan dua sisi tersebut: akses fisik yang layak dan agenda sosial yang membuat akses itu digunakan.

Threshold Capacity, Keamanan, dan Pengelolaan Risiko

Threshold capacity memiliki korelasi paling rendah di antara empat dimensi ($r = 0,398$), tetapi tetap berpengaruh dalam regresi ($B = 0,214$; $p = 0,001$). Uji beda tidak menemukan perbedaan antarkecamatan ($p = 0,367$). Kapasitas ambang karena itu diperlakukan sebagai fungsi pengelolaan risiko yang diperlukan di kedua wilayah.

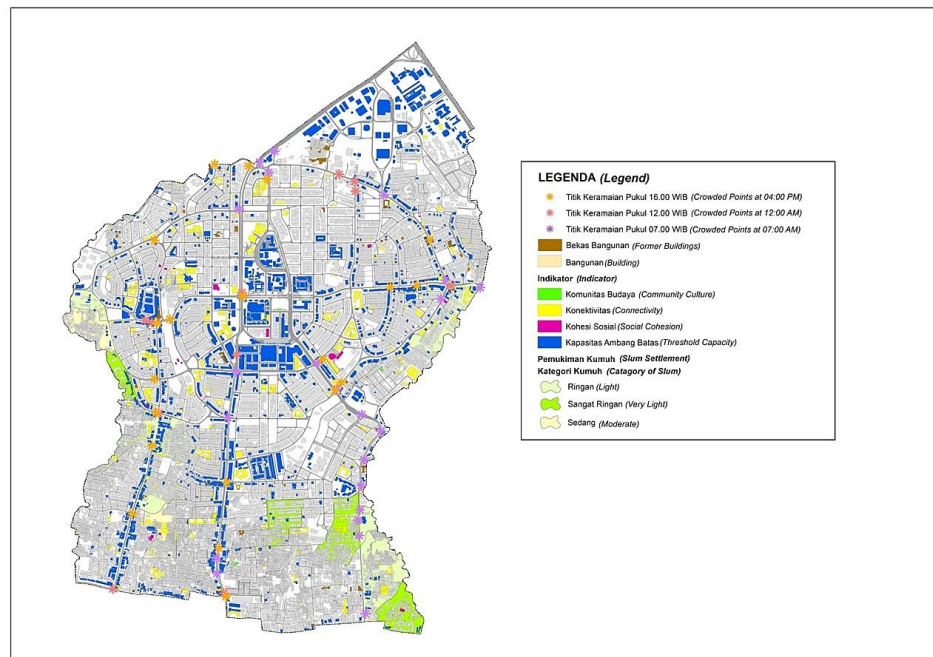
Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan memperlihatkan mekanisme yang sudah berjalan: kewajiban laporan, kunjungan rumah, koordinasi dengan penjamin, dan pencabutan pembebasan bersyarat ketika syarat tertentu tidak dipenuhi. Daerah percontohan dapat menambah lapisan lingkungan melalui penerangan, titik pengawasan yang proporsional, kanal pengaduan, dan koordinasi RT/RW. Pengawasan perlu dirancang agar memberi rasa aman tanpa menandai WBP sebagai objek yang selalu dicurigai. Fokusnya adalah membuat aktivitas komunitas dapat berlangsung dengan aturan yang jelas dan risiko yang dapat dikelola.

Pemetaan Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru



Gambar 4. Kecamatan Kebayoran Lama dalam Keseluruhan Aset Second Generation CPTED dan Faktor Risiko, Sumber: Olahan peneliti. 2026.

Pemetaan Kebayoran Lama menunjukkan banyak aset komersial dan pendidikan, tetapi ketersediaan aset tidak selalu sama dengan ruang interaksi yang dapat digunakan WBP. Tesis mencatat lebih dari dua ribu pertokoan dan sejumlah besar fasilitas pendidikan. Pada jam sibuk sore hari, aktivitas tinggi meningkatkan kebutuhan penerangan, pengawasan lingkungan, dan jalur pejalan kaki yang aman. Peneliti juga mencatat kebutuhan ruang teduh dan ruang terbuka pada siang hari agar aktivitas komunitas tidak bergantung pada tempat komersial.



Gambar 5. Kecamatan Kebayoran Baru dalam Keseluruhan Aset Second Generation CPTED dan Faktor Risiko

Sumber: Olahan peneliti. 2026.

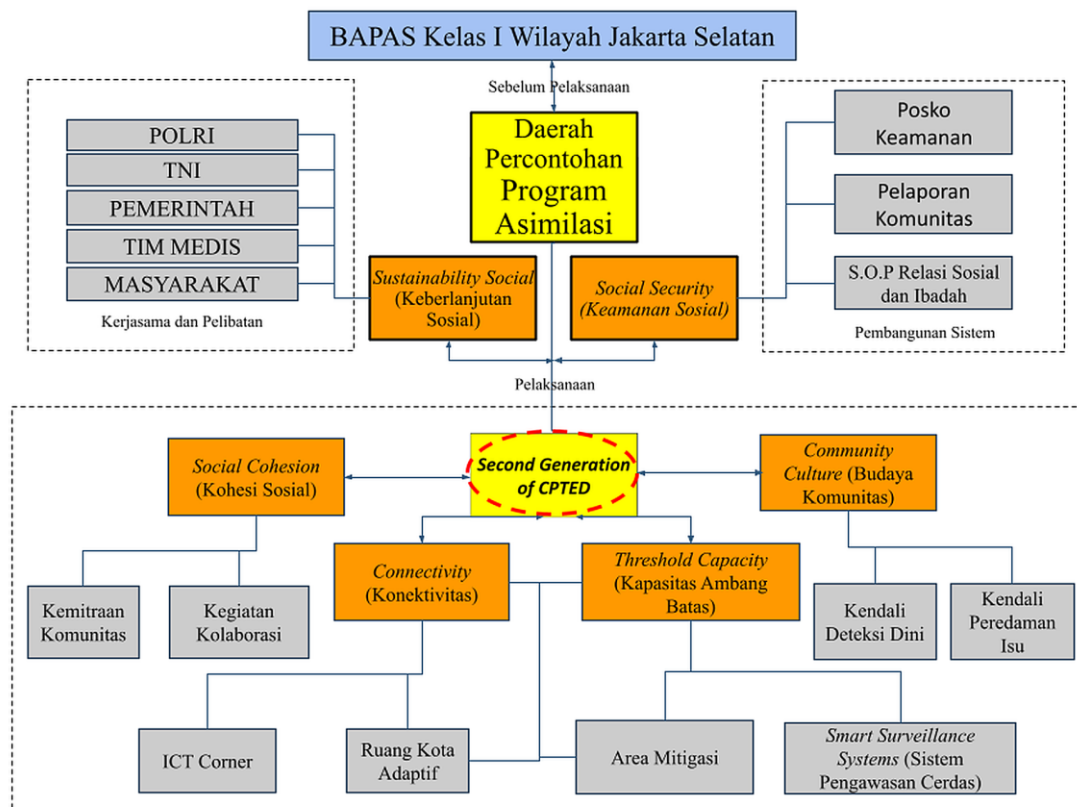
Pemetaan Kebayoran Baru memperlihatkan kepadatan fungsi perkantoran, pemerintahan, layanan keuangan, restoran, serta fasilitas publik lain. Aset tersebut memperbesar pilihan mobilitas dan kegiatan, tetapi wawancara menunjukkan bahwa beberapa WBP tetap kesulitan mengakses fasilitas olahraga atau ruang sosial dekat tempat tinggal. Perbedaan ini penting. Daerah dengan banyak fasilitas tetap dapat memiliki kantong lingkungan yang miskin ruang interaksi. Analisis CPTED karena itu perlu menggunakan peta aset bersama dengan observasi dan keterangan warga.

Dari dua peta tersebut, lokasi pilot tidak sebaiknya dipilih hanya karena jumlah fasilitasnya lebih banyak. Kebayoran Baru menawarkan modal infrastruktur yang kuat pada beberapa bagian wilayah, sedangkan Kebayoran Lama memiliki jaringan komunitas yang pada beberapa titik lebih mudah diaktifkan. Seleksi lokasi perlu memakai baseline yang memeriksa empat hal: keberadaan mitra komunitas, akses WBP ke ruang kegiatan, kondisi keamanan dasar, dan kesiapan warga menerima program.

Rancangan Daerah Asimilasi Percontohan

Rancangan daerah asimilasi percontohan menempatkan Bapas sebagai koordinator pembimbingan, bukan pengelola tunggal wilayah. Struktur yang disusun dalam tesis menghubungkan Bapas dengan pemerintah, POLRI, TNI, unsur kesehatan, masyarakat, pos keamanan, pelaporan komunitas, serta mitra rehabilitasi. Empat prinsip CPTED Gen 2 berada di lapisan pelaksanaan. Social cohesion bekerja melalui kegiatan bersama dan penerimaan; community culture melalui norma serta partisipasi lokal; connectivity melalui akses fisik dan komunikasi; threshold capacity melalui pengendalian risiko serta daya tampung ruang.

Hasil regresi dan sintesis kualitatif menghasilkan dua jenis urutan yang perlu dibedakan. Connectivity mempunyai koefisien statistik terbesar. Tesis kemudian menempatkan social cohesion sebagai prioritas pertama dalam rank and order strategi, diikuti community culture, connectivity, dan threshold capacity. Urutan strategi tersebut bukan ranking koefisien regresi. Ia berasal dari pembacaan gabungan terhadap angka, wawancara, dan kondisi ruang. Dalam model percontohan, konektivitas dapat menjadi pengungkit teknis terbesar, tetapi kohesi sosial tetap diperlukan agar fasilitas dan akses tidak berhenti sebagai infrastruktur tanpa interaksi.



Gambar 6. Rekomendasi Model Daerah Percontohan Asimilasi dengan Menerapkan Second Generation of CPTED

Sumber: Olahan peneliti berdasarkan integrasi data kuantitatif, kualitatif, dan pemetaan wilayah. 2026.

Pelaksanaan pilot dapat dimulai dengan baseline wilayah. Bapas dan pemerintah setempat memetakan WBP yang memenuhi ketentuan pembimbingan, mitra komunitas, ruang publik yang tersedia, jalur transportasi, titik kegiatan, serta keluhan keamanan. Tahap berikutnya adalah persiapan komunitas melalui pertemuan RT/RW, penjelasan program, dan penetapan kegiatan yang dapat diikuti WBP. Kegiatan tidak perlu dibuat eksklusif untuk WBP. Kelas keterampilan, olahraga, kerja bakti, program keagamaan, atau kegiatan ekonomi lokal dapat menggunakan agenda yang sudah ada.

Pengawasan berjalan bersamaan dengan partisipasi. Bapas mempertahankan kewajiban laporan dan kunjungan rumah, sementara lingkungan menyediakan mekanisme komunikasi bila muncul masalah. Teknologi dapat membantu pada pelaporan, pencatatan kehadiran, atau CCTV di titik yang memang membutuhkan pengawasan. Penggunaan teknologi harus mengikuti fungsi ruang dan risiko yang teridentifikasi. Memasang perangkat tanpa kebutuhan yang jelas hanya menambah pengawasan tanpa memperbaiki penerimaan sosial.

Tabel 7. Komponen Operasional Rancangan Daerah Asimilasi Percontohan

Dimensi	Dasar empiris	Intervensi wilayah	Indikator evaluasi
Social Cohesion	$B = 0,237$; $t = 3,962$; $p < 0,001$. Keterlibatan sosial muncul dalam wawancara.	Kegiatan warga bersama, penghubung RT/RW, olahraga, kerja bakti, kegiatan keagamaan.	Partisipasi WBP, penerimaan warga, kontinuitas kegiatan.
Community Culture	$B = 0,239$; $p = 0,008$. Uji beda antarkecamatan $p = 0,048$.	Edukasi komunitas, pelibatan tokoh lokal, penggunaan agenda komunitas yang sudah berjalan.	Perubahan skor penerimaan, keluhan stigma, keterlibatan mitra lokal.
Connectivity	$B = 0,480$; $t = 5,528$; $p < 0,001$. Uji beda $p = 0,023$.	Akses transportasi, jalur pejalan kaki, ruang aktivitas, kanal komunikasi dan pelaporan.	Akses pelatihan/kerja, kepatuhan laporan, frekuensi penggunaan ruang kegiatan.
Threshold Capacity	$B = 0,214$; $p = 0,001$. Uji beda $p = 0,367$.	Penerangan, titik keamanan, kanal pengaduan, pengawasan proporsional, aturan penggunaan ruang.	Persepsi rasa aman, jumlah keluhan, insiden, keberlanjutan partisipasi.

Sumber: Sintesis hasil penelitian. 2026.

Evaluasi pilot perlu melihat pada tabel 7 dimana memakai indikator yang dapat dibandingkan dengan baseline. Indikator minimal mencakup perubahan skor penerimaan masyarakat, jumlah dan konsistensi partisipasi WBP dalam kegiatan komunitas, akses terhadap pelatihan atau pekerjaan, kepatuhan pelaporan, keluhan masyarakat, dan persepsi rasa aman. Hasil evaluasi menentukan apakah intervensi dipertahankan, diubah, atau dihentikan. Tesis belum menguji tahap sesudah implementasi, sehingga dampak yang disebut dalam model harus dibaca sebagai target evaluasi, bukan hasil yang sudah tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Empat dimensi Second Generation of CPTED berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap program asimilasi. Community culture dan connectivity memiliki korelasi paling kuat, sedangkan regresi menempatkan connectivity sebagai prediktor terbesar. Model menjelaskan 60,4% variasi persepsi asimilasi. Uji beda memperlihatkan bahwa perbedaan Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru terutama berada pada budaya komunitas, konektivitas, dan persepsi program. Social cohesion dan threshold capacity tidak berbeda secara statistik pada dua kecamatan.

Data wawancara mengubah angka tersebut menjadi masalah yang dapat ditangani. WBP mendapat penerimaan ketika mereka terlibat dalam olahraga, kegiatan keagamaan, kerja lingkungan, atau pelatihan. Stigma, komentar negatif, keterbatasan ruang publik, penerangan, dan akses fasilitas membuat proses yang sama lebih sulit. Sentimen negatif yang mencapai 40% menandakan bahwa pembimbingan individu perlu berjalan bersama dengan pekerjaan di tingkat komunitas.

Unit implementasi yang disarankan adalah wilayah kecil yang dapat diuji, misalnya kelurahan atau RW. Bapas dapat memilih lokasi berdasarkan kesiapan komunitas, akses ruang kegiatan, dukungan keamanan, dan keberadaan mitra. Social cohesion menjadi fondasi sosial, community culture menentukan cara program masuk ke lingkungan, connectivity memastikan WBP dapat menggunakan layanan dan ruang, sedangkan threshold capacity menjaga batas aman aktivitas. Evaluasi sebelum dan sesudah pilot diperlukan sebelum model diperluas ke wilayah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada aparaturnya Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersedia diwawancarai, serta masyarakat Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru yang berpartisipasi dalam pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2022). Indonesia Drugs Report 2022.
- Balitbangham. (2014). Rancangan program dan strategi pengembangan lembaga pemasyarakatan. *Kebijakan Pemasyarakatan*, 1(1), 15-36.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591>
- Cleveland, G., & Saville, G. (2003). An introduction to Second Generation CPTED: Part 1. *CPTED Perspectives*, 6, 4-8.
- Cozens, P. M., Saville, G., & Hillier, D. (2005). Crime prevention through environmental design (CPTED): A review and modern bibliography. *Property Management*, 23(4), 328-356.
<https://doi.org/10.1108/02637470510631483>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ditjenpas. (2021). Beban psikologis napi yang bebas di tengah pandemi.
<http://www.ditjenpas.go.id/beban-psikologis-napi-yang-bebas-di-tengah-pandemi>
- Hapsari, Y. T. (2021). Pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap psychological adjustment pada warga binaan pemasyarakatan asimilasi (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati). *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*.
- Institute for Crime & Justice Policy Research. (2024). Highest to lowest: Prison population total. Birkbeck, University of London. https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All
- International CPTED Association. (2022). CPTED in brief. <https://cpted.net/Primer-in-CPTED>
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Researcher*, 33(7), 14-26.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Saville, G., & Cleveland, G. (1997). Second-generation CPTED: The rise and fall of opportunity theory. Paper presented at the 2nd International CPTED Conference, Orlando.
- Sufi, W., & Rahayu, S. (2022). Pelaksanaan asimilasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*.